



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PENINGKATAN AKSES INFORMASI HUKUM DI DAERAH MELALUI JDIH DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL

Dr.Eng. Hary Budiarto M.Kom
Kepala Badan Pengembangan SDM Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

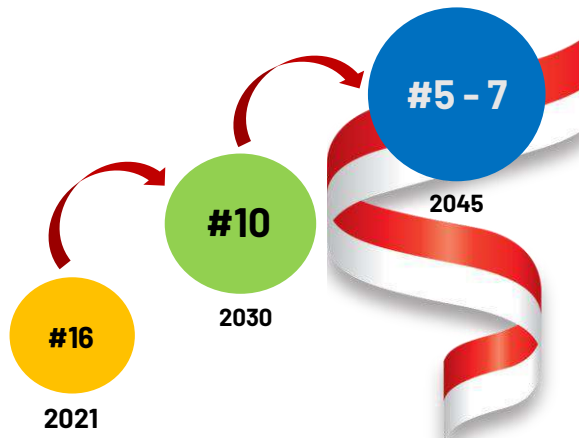
Jakarta, 12 Oktober 2023



OUTLINE

- 1 Program Transformasi Digital Indonesia**
- 2 Peran Kementerian Kominfo**
- 3 Pembahasan Goal Sharing Session**

Proyeksi Indonesia Maju di 2045



(Visi Indonesia 2045, Bappenas)

Berbagai studi menyebutkan bahwa Indonesia dapat mencapai negara TOP 5-7 PDB tertinggi dunia di 2045. Kunci untuk bisa mencapainya adalah dengan **penguasaan teknologi digital**

Dampak Perkembangan Teknologi Digital yang Pesat

Perkembangan teknologi digital membawa potensi ekonomi tetapi juga membawa berbagai risiko dan tantangan yang perlu diantisipasi sekaligus dikelola bersama

Isu dan Tantangan

Kesenjangan Digital

- Infrastruktur dan konektivitas digital
- Akses terhadap perangkat TIK
- Resiliensi infrastruktur terhadap kondisi alam

Disrupsi Teknologi

- *Job Displacement*
- Kualitas SDM digital nasional
- Disrupsi pada sektor konvensional

Isu Data & Keamanan Siber

- Ketahanan *national cybersecurity*
- Perlindungan data
- *Cross border data*
- *Online safety*

Isu Kedaulatan Digital

- Ketergantungan teknologi

Isu Sosial Kultural

- Hoax dan disinformasi
- Literasi media
- Erosi nilai budaya
- *Digital Ethics*

Potensi Ekonomi

Persentase Pertumbuhan Ekonomi 2045

7%

(Bappenas, 2023)

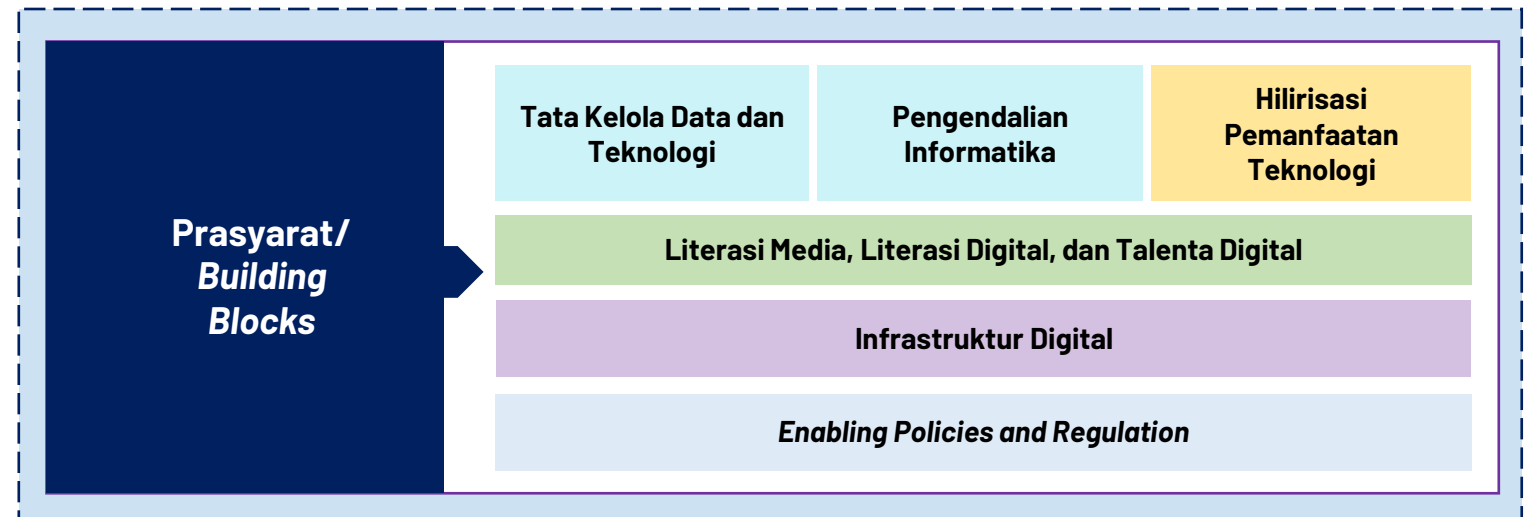
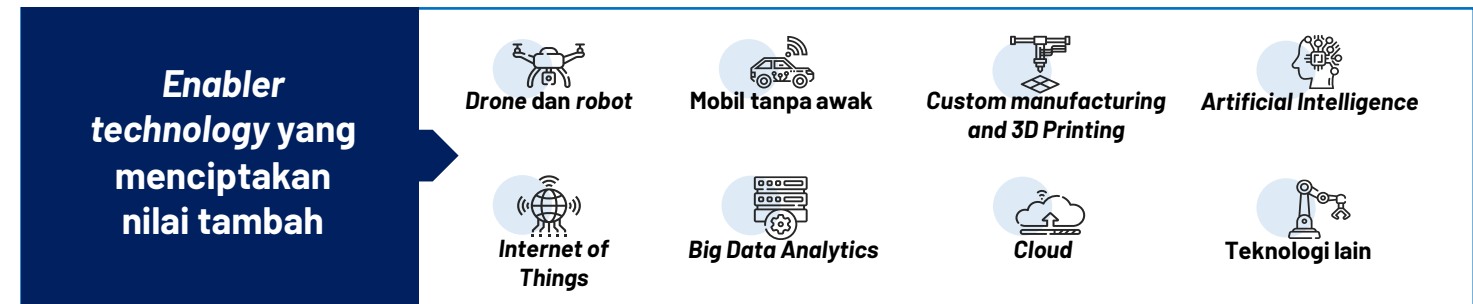
Teknologi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% s.d. 7,1%

Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB di tahun 2045

20,70%

(Bappenas, 2022)

Ekonomi digital diprediksikan memberikan kontribusi 20.70% terhadap PDB US\$ 8.89 di 2045



Peran Kementerian Kominfo dalam Agenda Transformasi Digital Indonesia



Dengan memperhatikan berbagai isu dan tantangan yang ada - serta mengingat peran sentral Kementerian Kominfo dalam agenda transformasi digital, **berbagai program akan terus dilakukan**, diantaranya:





Goal

1

Fasilitasi kominfo untuk diskominfo provinsi/kab/kota dalam hal sarana prasarana IT

2

Tata cara pengelolaan IT untuk diskominfo provinsi/kab/kota

3

Kebutuhan dalam hal permohonan hosting di Pusat Data Nasional (PDN)

Fasilitas Pelatihan GTA para ASN Dinas kominfo Prov./Kab./Kota



GTA Government Transformation Academy

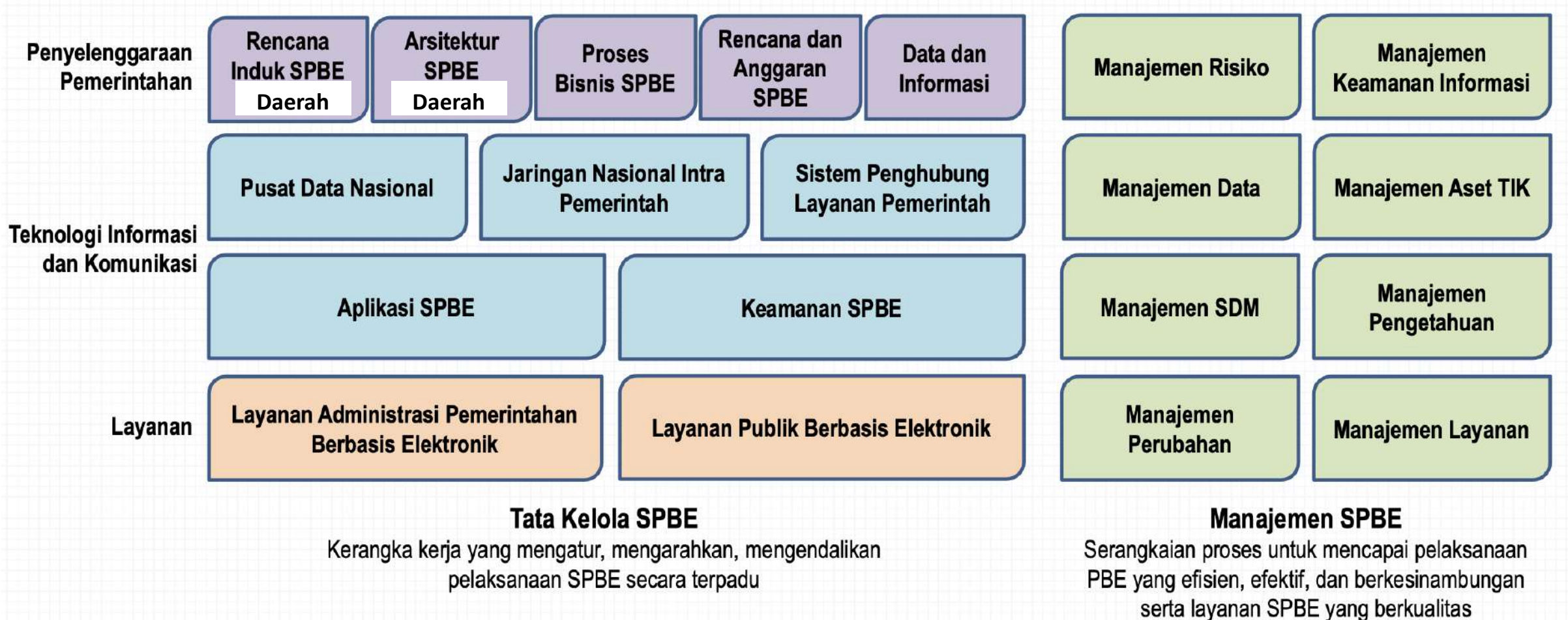
<https://digitalent.kominfo.go.id/>





Tata Kelola SPBE untuk pengelolaan JDIH pada Dinas Kominfo Daerah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah salah satu aplikasi SPBE maka dalam Pembangunannya harus dimasukkan dalam arsitektur SPBE di Pemerintah Daerah Prov./Kab./Kota.



Menteri PANRB

- Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional
- Mengoordinasikan seluruh program SPBE Nasional
- Mengoordinasikan **proses bisnis pemerintahan**
- Menetapkan aplikasi umum
- Menetapkan manajemen risiko, SDM, perubahan

Menteri PPN/ Bappenas

- Mengoordinasikan perencanaan SPBE K/L dan Nasional
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data (dalam kerangka Satu Data Indonesia)

Menteri Keuangan

Mengoordinasikan penganggaran SPBE K/L dan Nasional

Kepala BRIN

- Melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Nasional dan Aplikasi Umum
- Menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi



Menteri Kominfo

- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi
- Mengoordinasikan pembangunan infrastruktur TIK
- Kebijakan umum audit TIK
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan

Menteri Dalam Negeri

- Mengoordinasikan proses bisnis Pemda
- Mengoordinasikan penerapan SPBE di Pemda

Kepala BSSN

- Melaksanakan pengamanan SPBE
- Menyusun standar keamanan SPBE Nasional
- Menetapkan manajemen dan melaksanakan audit keamanan SPBE

1. Permohonan untuk pengajuan Cloud Government (Infrastructure As A Service) dari Kepala Daerah ke Menteri Komunikasi dan Informatika atau Dirjen Aplikasi Informatika.
2. Permohonan IAAS dilengkapi dengan nama domain, jumlah core yg diperlukan dan kapasitas Storage yang dibutuhkan.
3. Lakukan pengembangan aplikasi dan ujicoba terlebih dulu terutama serta terintegrasi dengan aplikasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam Arsitektur SPBE.
4. Kemenkumham membangun Superaps JDIH sehingga sumber hukum bisa terintegrasi dan sesuai dengan konsep satu data nasional.
5. Komunikasi lebih lanjut bisa hubungi <https://pdn.layanan.go.id>





KOMINFO

Q Cari

LAYANAN PEMERINTAH

LAYANAN NON PEMERINTAH

PERIZINAN

SERTIFIKASI

ADUAN KONTEN

PANGGILAN DARURAT 112

BEASISWA

HUKUM

STATISTIK

BERITA

FAQ

DIREKTORI

Laman KOMINFO

ADUAN LAPOR!






Terima Kasih

**Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia**

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110 | www.kominfo.go.id

 @Kemenkominfo |  @Kemenkominfo |  @kemenkominfo